

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL SESUAI DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH (PP) 71 TAHUN 2010
(Study pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun)**

Oleh :

Supriyono

Pembimbing : Desmiyawati dan Nur Azlina

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

email : supriyono 81@ymail.com

*The Implementation Analisis of accrual basis of SAP
accord government regulations 71 tahun 2010
(study in Karimun regency government)*

ABSTRACT

The formulation of the research problem is as follows: 1). How readiness district government that Karimun indicated by the commitment, human resources, infrastructure and information systems in mengimplementa sikan PP 71 Year 2010 About the Government Accounting Standards (SAP) Based Accrual?, What are the obstacles in the implementation of Regulation No. 71 Year 2010, on Accounting Standards Government (SAP)? 2). What is an obstacle in the implementation of Regulation No. 71 Year 2010, concerning the Government Accounting Standards (SAP)? 3). How acceleration strategy implementation models PP 71 Year 2010 concerning Governmental Accounting Standards (SAP)? 3). How is the acceleration of the implementation of strategic models PP 71 Year 2010 concerning Governmental Accounting Standards (SAP), the results of this research show that commitmet has significant 0,388,the analysis with the human resource variable in has significant 0,369 , infrastructure variable in has significant 0,352 and information system it show positif significant 0,354. Of the research in the know that the implementation of the application of accrual-based government accounting standards in Karimun regency government is ready to implement the category of Government Accounting Standards (SAP) based accrual accordance with Government Regulation (PP) 71 in 2010.

Keywords : implementation, accounting, accrual basis, government regulations

PENDAHULUAN

Reformasi pengelolaan keuangan Negara masih terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun

2003 tentang keuangan Negara, yang mengharuskan keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin

diwujudkan. Salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

Ada beberapa isu terkait dengan penerapan basis akrual yang menjadi objek penelitian, diantaranya isu tersebut adalah :

1. Perumusan kebijakan akuntansinya, dimana basis kas yang hanya mencatat transaksi penerimaan dan pembayaran kas secara relative akan mudah dioperasikan.. pengakuan dan pengukuran atas transaksi yang semakin komplek menyebabkan persyaratan kemampuan teknis yang lebih tinggi karena mengandung resiko kesalahan dan salah saji yang tinggi. Isu utamanya adalah bahwa pemerintah perlu memfokuskan pada materi pilihan kebijakan akuntansi mana

yang paling tepat yang konsisten dengan standar akuntansinya.

1. Informasi kas dalam kerangka kerja akrual, penerapan basis kas menuju basis akrual bukan berarti menghilangkan basis kas, tetapi pengelolaan kas merupakan bagian yang integral dari kerangka manajemen keuangan berbasis akrual.

2. Klasifikasi anggaran dan akun standar. Apabila pemerintah menerapkan basis akrual pada akuntansi dan anggarannya secara simultan, akun standar dan klasifikasi anggaran sebaiknya disamakan, akan tetapi jika pemerintah menerapkan basis akrual hanya pada akuntansi dan masih menerapkan basis kas pada anggarannya, akan ada perbedaan antara akun Standar dan klasifikasi anggaran. Namun demikian, akun standar tetap akan mencakup laporan – laporan yang berbasis akrual maupun kas.

3. Neraca awal, neraca awal dari penerapan basis akrual harus didukung dengan informasi dan penjelasan yang cukup untuk kepentingan audit. Pada titik ini, kegiatan tersebut akan memakan waktu yang lama dan sangat riskan.

4. Proses keuangan yang tersentralisasi atau terdesentralisasi menyangkut apakah tingkat kementerian atau satker (satuan kerja) dipersyaratkan melaporkan secara harian operasinya atau tidak, jika ya, pemerintah perlu melakukan penilaian skala dan kompleksitas transaksi yang tercakup dalam identifikasi dan pengukuran atas transaksi dan saldo-saldo rekening basis akrual.

Pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggung jawabanyang menggunakan sistem

akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam sistem Pemerintah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin.. Pemerintah Kabupaten Karimun harus menerapkan SAP pada masing-masing SKPD yang ada. Terlebih dengan adanya pengembangan sistem akuntansi dan pengembangan SDM dalam strategi penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap yang menyebabkan perlunya penyesuaian kembali, ada beberapa permasalahan yang harus di hadapi pemerintah kabupaten karimun dalam penerapan penerapan standar akuntansi berbasis akrual sesuai dengan peraturan pemerintah no.71 tahun 2010, yaitu :

1. Mengkoversi kebiasaan dalam menyusun laporan keuangan berbasis kas ke basis akrual tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, memakan banyak waktu, terlebih lagi terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah kabupaten karimun yang jumlahnya pasti tidak sedikit.

2. Kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) lulusan perguruan tinggi di bidang akuntansi, saat ini saja tercatat hanya 10 orang saja Pegawai Negeri Sipil di bidang Akuntansi, hal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pengimplementasian basis akrual yang sesuai dengan PP 71 tahun 2010, padahal lulusan sarjana di bidang akuntansi sangat dibutuhkan untuk perencanaan,

penganggaran, pelaporan, serta pengelolaan keuangan Daerah.

Adapun rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah kesiapan Pemda Kabupaten Karimun yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi dalam mengimplementasikan PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual ? 2) Apakah yang menjadi kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah(SAP)? 3) Bagaimanakah model strategis akselerasi implementasi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui kesiapan Pemda Kabupaten yang Karimun diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi. 2) Untuk mengetahui kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 3) Untuk mengetahui model strategis akselerasi implementasi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini,antara lain:

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan,wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama berada di bangku perkuliahan.

- b. Bagi Akademisi

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai

analisa implementasi penerapan SAP dan kesiapan sumber daya manusia di Pemerintah Kabupaten Karimun dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintahan (baik Pemerintah yang ada di Pusat atau Pemerintah yang ada Daerah) yang akan menggunakan SAP berbasis akrual.

TELAAH PUSTAKA

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2003 pasal 3 ayat (1) tentang keuangan Negara, yang mengharuskan keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan. Salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hubungan Komitmen Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan PP 71 Tahun 2010

Menurut Porter *et.al.* dalam Miner, (1992:124), komitmen adalah dukungan yang kuat dari pimpinan

dan bawahan satuan kerja termasuk pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah ditentukan sebagai penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

Hubungan Sumber daya manusia Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan PP 71 Tahun 2010

Menurut Hasibuan (2000:3), sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah. Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada DPR dan oleh Pemerintah kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Pada saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa, apalagi menjelang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik KKN oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan. Resistensi terhadap perubahan. Sebagai layaknya untuk setiap

perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan system yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik. Konsepsi tentang Kebijakan komitmen Pemerintah terkait dengan SAP berbasis akrual.

Hubungan Infrastruktur Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan PP 71 Tahun 2010

Infrastruktur adalah pendukung utama penerapan sistem akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang diukur dengan aset fisik yang penting dalam kelancaran penerapan SAP berbasis akrual (Grigg, 2000).

Hubungan Sistem informasi Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan PP 71 Tahun 2010

Menurut Mukhtar (2002: 4), sistem informasi adalah sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Hal tersebut telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 1 tahun 2004 yang menyatakan "Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh". SPI

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan hal tersebut pada tahun 2008 telah terbit PP No. 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Di satu sisi kajian ini berupaya mendeskripsikan suatu fenomena secara apa adanya dari prespektif pelakunya, sedang dari sisi pendeskripsian itu dilakukan dengan bantuan alat- alat analisis kuantitatif. Dengan demikian diharapkan fenomena tentang Analisis Pemda dalam implementasi SAP, kendala-kendala yang dihadapi di daerah dapat dideskripsikan secara gamblang untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menarik suatu kesimpulan Menurut Bungin (2008),

Populasi penelitian adalah sekumpulan objek yang ditentukan melalui suatu kriteria tertentu yang akan dikategorikan ke dalam objek tersebut bisa termasuk orang, dokumen atau catatan yang dipandang sebagai objek penelitian. Menurut Sugiyono (2009:117), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah,

Kepala Dinas dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan yang ada di dinas-dinas/instansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Karimun yaitu sebanyak 52 populasi dari 26 SKPD

Sampel Penelitian adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Untuk menentukan besarnya sampel tersebut bisa dilakukan secara statistik maupun berdasarkan estimasi penelitian, selain itu juga perlu diperhatikan bahwa sampel yang dipilih harus representative artinya segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dipilih

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian diukur dengan Komitmen, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Sistem Informasi yang dijelaskan sebagai berikut :

Alat Ukur / Instrumen Penelitian

Skala adalah perangkat ukur yang digunakan untuk mengetahui intensitas, arah atau tingkat dalam sebuah variabel yang berada pada tingkat pengukuran ordinal. Penelitian ini menggunakan skala likert, yaitu pengukuran yang memungkinkan responden untuk merangking seberapa kuat mereka siap atau tidak siap terhadap pernyataan-pernyataan tertentu. Skala ini mempunyai jarak dari sangat positif ke sangat negatif terhadap obyek sikap tertentu. Skala likert juga diartikan sebagai cara pengukuran dengan menghadapkan seorang responden dengan sebuah pernyataan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban. Skala yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian kemendagri (2012) dimana skala

pengukuran kuisioner menggunakan skala:

- 1 = sangat tidak siap
- 2 = tidak siap
- 3 = Cukup siap
- 4 = siap
- 5 = sangat siap

Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana validitas data diperoleh dari penyebaran kuisioner. Uji validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antar masing-masing pertanyaan ataupun pernyataan dengan skor total pengamatan (Arikunto, 2006:202).

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan dua kali atau lebih (Umar 2003:176). Reliabilitas dapat dikatakan menunjukkan kekonsistenan dari suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Makin kecil kesalahan pengukuran makin *reliabel* alat pengukur begitu pula sebaliknya. Pengujian keandalan alat pengukuran dalam penelitian ini menggunakan reliabilitas

menggunakan metode alpha (α). Metode alpha yang digunakan adalah metode Cronbach. Menurut Yarnest (2003; 68) instrumen dapat dikatakan handal (*reliabel*) bila memiliki koefisien reliabilitas diatas 0,6. Setelah menilai alpha, selanjutnya membandingkan nilai tersebut dengan angka kritis reliabilitas. Instrumen yang dipakai dalam variabel diketahui handal (*reliabel*) apabila memiliki *Cronbach Alpha* > 0,60 (Ghozali, 2002:42).

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data ini diperoleh dari survey responden. (Indriantoro 2009).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan Survey Lapangan. Survey ini dilakukan secara lebih mendalam dengan cara mengamati secara langsung pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode survey dalam penelitian ini adalah kuisisioner dan wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk mendalami informasi yang belum didapat pada studi kepustakaan sedangkan kuisisioner adalah suatu teknik pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuisisioner. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. (Supomo dan Indriantoro 2009). Adapun rancangan pertanyaan dalam wawancara tersebut akan dilampirkan.

Analisis Deskriptif Kualitatif

Teknik yang dipakai dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif menurut Indriantoro dan Supomo (2002:26), merupakan penelitian terhadap masalah-masalah

yang berupa fakta saat ini dari suatu populasi. Penelitian ini menggunakan deskripsi analisis. Metode analisis untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai penelitian. Metode ini untuk memaparkan sesuatu dengan cara mendiskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang saat ini terjadi. Metode analisis deskriptif sesuai dengan hakikatnya adalah data yang telah terkumpul kemudian diseleksi, dikelompokkan, dilakukan pengkajian, interpretasi dan disimpulkan. Selanjutnya hasil kesimpulan itu dideskripsikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek yang digunakan oleh peneliti adalah pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode survey dalam penelitian ini adalah kuisisioner dan wawancara, di mana penyebarannya dilakukan dengan melakukan Survey Lapangan. Survey ini dilakukan secara lebih mendalam dengan cara mengamati secara langsung pada objek penelitian.

Keseluruhan kuesioner yang disebar adalah sebanyak 52 kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak 47 kuesioner (90%), dan sebanyak 5 kuesioner (10%) tidak mendapat respon atau tidak lengkap. Perhitungan tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel .

Tabel 1
Sampel dan Tingkat
Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jumlah kuesioner yang dikirimkan	52	100%
Jumlah kuesioner kembali	47	90%
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	5	10%
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	42	81%

Sumber: Data Olahan (2015)

Metode Analisis Data

Uji Instrumen Data

Uji Validitas

Validitas merupakan konsep pengukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen dikatakan valid jika instrument tersebut menghasilkan hasil ukur sesuai dengan tujuan pengukurannya. Jika suatu item pernyataan dinyatakan tidak valid maka item pertanyaan itu tidak dapat digunakan dalam uji-uji selanjutnya (Indrianto dan Supomo, 2009).

SPSS menyediakan fasilitas uji validitas yakni dengan cara memunculkan tabel Reliability Analysis yang diolah dengan menggunakan program SPSS *for widows 20.0 version*, untuk validitas dapat dilihat dari kolom ke tiga yaitu kolom *Corrected Item- Total Correlation*. Dikatakan valid suatu data apabila hasil analisis tiap pertanyaan atau koefisien korelasi (r) yang diperoleh mempunyai nilai positif atau bernilai diatas nilai- nilai kritis r , yaitu pada taraf signifikansi 5%.

Penentuan validitas data menggunakan korelasi pearson, hasil korelasi antar variabel dibandingkan dengan range angka korelasi -1, 0 dan + 1 pada tingkat signifikan 0.05 apabila r_{hitung} mendekati angka 1,

maka instrumen tersebut valid. Sebaliknya jika r_{hitung} mendekati angka 0 (semakin menjauhi angka 1) maka instrumen penelitian tersebut tidak valid (Indrianto dan Supomo, 2009).

Berdasarkan data yang diperoleh telah dilakukan uji korelasi pearson dan cronbach alpha dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Variabel
Komitmen (X1)

No	Item	Nilai		Kesimpulan
		Hitung	Tabel	
1	X1.1	0.388	0.347	Valid
2	X1.2	0.687	0.347	Valid
3	X1.3	0.442	0.347	Valid
4	X1.4	0.421	0.347	Valid
5	X1.5	0.519	0.347	Valid
6	X1.6	0.520	0.347	Valid
7	X1.7	0.461	0.347	Valid
8	X1.8	0.517	0.347	Valid
9	X1.9	0.392	0.347	Valid
10	X1.10	0.567	0.347	Valid
11	X1.11	0.539	0.347	Valid

Sumber : Data Hasil Penelitian

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan untuk Variabel Komitmen dinyatakan valid. Hasil validitas menunjukkan bahwa nilai terendah pada item pertanyaan pertama yaitu 0,388. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variabel diatas 0,347.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Variabel
Sumber Daya Manusia (X2)

No	Item	Nilai		Keterangan
		Hitung	Tabel	

1	X2.1	0.511	0.347	Valid
2	X2.2	0.453	0.347	Valid
3	X2.3	0.389	0.347	Valid
4	X2.4	0.498	0.347	Valid
5	X2.5	0.424	0.347	Valid
6	X2.6	0.532	0.347	Valid
7	X2.7	0.426	0.347	Valid
8	X2.8	0.372	0.347	Valid
9	X2.9	0.369	0.347	Valid
10	X2.10	0.443	0.347	Valid
11	X2.11	0.483	0.347	Valid

Sumber : Data Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan untuk Variabel Sumber Daya Manusia dinyatakan valid. Hasil validitas menunjukkan bahwa nilai terendah pada item pertanyaan kesembilan yaitu 0.369. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variabel diatas 0,347.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Variabel Sarana dan Prasarana Aparatur (X3)

No	Item	Nilai		Keterangan
		Hitung	Tabel	
1	X3.1	0.512	0.347	Valid
2	X3.2	0.352	0.347	Valid
3	X3.3	0.386	0.347	Valid
4	X3.4	0.549	0.347	Valid
5	X3.5	0.521	0.347	Valid
6	X3.6	0.355	0.347	Valid

Sumber : Data Hasil Penelitian

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan untuk Variabel Sarana dan Prasarana Aparatur dinyatakan valid. Hasil validitas menunjukkan bahwa nilai terendah pada item pertanyaan kedua yaitu 0,352. dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa semua item variabel diatas 0,347.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Informasi Akuntansi (X4)

No	Item	Nilai		Keterangan
		Hitung	Tabel	
1	X4.1	0.536	0.347	Valid
2	X4.2	0.379	0.347	Valid
3	X4.3	0.354	0.347	Valid
4	X4.4	0.378	0.347	Valid
5	X4.5	0.399	0.347	Valid
6	X4.6	0.579	0.347	Valid

Sumber : Data Hasil Penelitian

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan untuk Variabel Sistem Informasi Akuntansi dinyatakan valid. Hasil validitas menunjukkan bahwa nilai terendah pada item pertanyaan ketiga yaitu 0,354. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variabel diatas 0,347.

Uji Reliabilitas

Untuk menguji reliabilitas dipergunakan uji *cronbach alpha* yang dianggap paling sesuai untuk pengujian item-item penelitian yang memiliki skor 1-5. Dalam metode *internal consistency* ini, semakin tinggi konsistensi alpha maka kuesioner semakin reliabel. Batasan nilai minimum *alpha* dalam penelitian ini adalah 0.60 (Nunnally, 1970). Jadi, Jika *alpha* lebih besar dari 0.60, Maka data dianggap *reliable*.

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas Variabel

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Komitmen (X1)	0.753	Reliabel
2	Sumber Daya Manusia (X2)	0.669	Reliabel
3	Sarana dan Prasarana Aparatur (X3)	0.705	Reliabel
4	Sistem Informasi Akuntansi (X4)	0.723	Reliabel

Sumber : Data Hasil Penelitian

Dari Tabel diatas, Komitmen (X1) sebesar 0,753 (>0.60). Sumber Daya Manusia (X2) sebesar 0,669 (>0.60). Sarana dan Prasarana Aparatur (X3) memiliki koefisien alpha sebesar 0,705 (>0.60) dan Sistem Informasi Akuntansi (X4) memiliki koefisien alpha sebesar 0,723 (>0.60) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian yang reliabel karena nilai *cronbach alpha* lebih besar dari nilai koefisien alpa 0.60. Berarti variabel yang digunakan sudah konsisten dan dapat dipercaya.

Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif atau statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian. Analisis data penelitian dilakukan terhadap 42 pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun dalam menanggapi kesiapan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam mengimplementasikan laporan keuangan SAP berbasis akrual.

Statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 7
Hasil Statistik Deskriptif

Keterangan	Jumlah	Minimum	Maximum	Standar deviasi
Integritas	42	44	52	,656
Kompetensi SDM	42	44	51	,476
Sarana dan Prasarana	42	23	28	,246
Sistem Informasi Akuntansi	42	23	29	,267

Sumber: Output SPSS (Data Diolah, 2015)

Dari tabel , Komitmen (X1) menunjukkan seberapa besar Komitmen yang dilakukan 42 pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten

Karimun yang menjadi sampel, Komitmen terendah sebesar 44 dan tertinggi sebesar 52. Rata-rata Komitmen sebesar 47,45 dengan standar deviasi 1,656. Hal ini menunjukkan Komitmen Pemerintah Kabupaten Karimun dalam mengimplementasikan laporan keuangan SAP berbasis akrual.

Dari 42 pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun yang menjadi sampel, Sumber Daya Manusia (X2) terendah sebesar 44 dan tertinggi sebesar 51. Rata-rata Sumber Daya Manusia adalah 47,33 dengan standar deviasi sebesar 1,476. (Kategori Siap).

Dari 42 pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun yang menjadi sampel, Sarana dan Prasarana Aparatur (X3) terendah sebesar 23 dan tertinggi sebesar 28. Rata-rata Sarana dan Prasarana Aparatur adalah 25,64 dengan standar deviasi sebesar 1,246. Hal ini menunjukkan kesiapan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karimun dalam mengimplementasikan laporan keuangan SAP berbasis akrual.

Dari 42 pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun yang menjadi sampel, Sistem Informasi Akuntansi terendah sebesar 23 dan tertinggi sebesar 29. Rata-rata Sistem Informasi Akuntansi adalah 26,17 dengan standar deviasi sebesar 1,267. Hal ini menunjukkan kesiapan Sistem Informasi Akuntansi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dalam mengimplementasikan laporan keuangan SAP berbasis akrual.

Pembahasan Alat Ukur / Instrumen Penelitian

Skala adalah perangkat ukur yang digunakan untuk mengetahui intensitas, arah atau tingkat dalam sebuah variabel yang berada pada tingkat pengukuran ordinal. Penelitian ini menggunakan skala likert, yaitu pengukuran yang memungkinkan responden untuk merangking seberapa kuat mereka siap atau tidak siap terhadap pernyataan-pernyataan tertentu. Skala yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian kemendagri (2012) dimana skala pengukuran kuisioner menggunakan skala:

1 = sangat tidak siap

2 = tidak siap

3 = Cukup siap

4 = siap

5 = sangat siap

Hasil dari uji menggunakan skala likert dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini :

Tabel 8
Hasil Rekap Data Alat Ukur / Instrumen Penelitian

No	Variabel	Skala					Total
		1	2	3	4	5	
1	Komitmen (S.A.P)	0	0	2	315	145	462
2	Manpower (SDM)	0	0	0	322	140	462
3	Sarana dan Prasarana (SIP)	0	0	4	180	68	252
4	Sistem Informasi (SIMDA)	0	0	5	152	95	252
	Total	0	0	11	969	448	1428
	Persentase	0%	0%	0,77%	68%	1,37%	100%

Sumber: Output SPSS (Data Diolah, 2015)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari jawaban 42 responden skala tertinggi adalah skala 4 (siap) dengan total jawaban 969 dengan persentase 67,86%. Maka implementasi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual pada Pemda Kabupaten Karimun yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dilihat dari parameter integritas adalah kategori siap dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah (S.A.P) berbasis Accrual dan untuk kesiapan SDM, kesiapan sistem informasi dan sarana prasarana adalah kategori cukup siap.

Sedangkan setelah melalui wawancara dengan pihak yang terkait, kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) antara lain, sampai saat ini penyusunan LKPD masih dilakukan secara manual (excel) belum ada perangkat lunak khusus, jumlah SDM pelaksana secara kuantitas masih belum cukup, kurangnya BinteK atau pelatihan, kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum mencukupi.

Dan untuk model strategis akselerasi implementasi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) antara lain Pengembangan SAP Berbasis AkruaL sesuai dengan kebutuhan, penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaL sesuai dengan kebutuhan, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Akuntansi Pemerintahan, belum adanya aplikasi (SIMDA) seri

terbaru, karena Aplikasi ini (SIMDA) milik Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan tidak di perjual belikan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun bergantung pada BPKP, sehingga berubah – ubah dalam mengimplementasikan aplikasi baru tentang accrual basis.

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual pada Pemda Kabupaten Karimun yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dilihat dari parameter integritas adalah kategori siap dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah (S.A.P) berbasis Accrual dan untuk kesiapan SDM, kesiapan sistem informasi dan sarana prasarana adalah kategori cukup siap.
2. Kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) antara lain, sampai saat ini penyusunan LKPD masih dilakukan secara manual (excel) belum ada perangkat lunak khusus, SDM terbatas, Model strategis akselerasi implementasi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) antara lain Pengembangan SAP Berbasis Akrua sesuai dengan kebutuhan, penyusunan Buletin Teknis SAP Berbasis Akrua sesuai dengan kebutuhan, Pengembangan SDM di

Bidang Akuntansi Pemerintahan, belum adanya aplikasi (SIMDA) seri terbaru, karena Aplikasi ini (SIMDA) milik Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan tidak di perjual belikan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun bergantung pada BPKP, sehingga berubah – ubah dalam mengimplementasikan aplikasi baru tentang accrual basis.

Keterbatasan Penelitian

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian, hasil penelitian ini juga mengandung beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Pemilihan objek penelitian hanya menggunakan satu ruang lingkup kabupaten/kota saja, yaitu Pemerintahan Kabupaten Karimun.
2. Penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel-variabel Komitmen, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana dan Sistem Informasi yang mempengaruhi kesiapan implementasi penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu:

1. Penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk menggunakan objek penelitian yang lebih luas dengan ruang lingkup Provinsi (tingkat I).
2. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan beberapa variabel lain yang mungkin mempengaruhi kesiapan implementasi penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta, Erlangga.
- Bodnar, George H, and William S. Hopwood. 2002. *Sistem Informasi Akuntansi*, Buku I. Jakarta: Penerbit salemba empat
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Business: Theory and Practice, 11 (1): 77-85.
- Grigg, Neil, & Fontane G. Darrel, 2000. *Infrastructure System Management & Optimization*. Internasional Seminar "Paradigm & Strategy of Infrastructure Management" Civil Engineering Departement Dipononegoro University
- Grigg, Neil, 1988. *Infrastructure Engineering and Management*. John Wiley and Sons.
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2002. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- International Business & Economics research Journal, 9 (11): 71-78.
- Kieso, Donald E. Dkk. *Akuntansi Intermediate*, Edisi Keduabelas, Jilid 1 . Terjemahan oleh Emil Salim. 2008. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Muchtar, A.M. 2002. *Audit Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Edisi ke-1. Andi Offset, Yogyakarta
- Mulyana, Budi, penggunaan *Akuntansi Akrua* di Negara-Negara Lain; Tren di Negara-Negara Anggota OECD
- Noerdiawan D, Iswahyudi, Maulidah, 2007, *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.
- Pusat Litbang Pembangunan Dan Keuangan Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. 2010. *Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Sap Berbasis Akrua* Penuh Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Jakarta
- Robert J. Kodoatie, 2003. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Saleh, Z & Pendlebury M.W. 2002. *Accruals Accounting in Government-Developments in Malaysia*. Asia Pacific Business Review, 12 (4): 421-435.
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi III*. Jakarta : Indonesia , Salemba Empat
- Simanjuntak, Binsar. tanpa tahun. *Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art.7pdf>, [November 2012].

Tanjung, Abdul Hafiz, 2012,
*Akuntansi Pemerintahan Daerah
Berbasis Akrua; Pendekatan Teknis
Sesuai PP No. 71/2010*, Bandung,
Alfabeta.

Tickell, Geoffrey. 2010. Cash To
Accrual Accounting: One Nation's
Dilemma.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintah Daerah

Widjajerso, Bambang, 2008.
Penerapan Basis Akrua Pada
Akuntansi Pemerintah.